

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi Pandemi COVID-19 saat ini, menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap pergerakan ekonomi. Pergerakan ekonomi saat ini sangatlah lemah terutama dibidang pariwisata. Di Bali sendiri bisnis pariwisata rontok selama Pandemi COVID-19. Banyak warga dari Bali utara atau Buleleng yang sebelumnya tersedot ke wilayah selatan terpaksa kembali ke desa masing-masing, karena mereka yang sebelumnya bergantung pada sektor pariwisata yang pusat industri pariwisatanya berada di wilayah selatan Bali atau Denpasar dan sekitarnya kini terputus akibat COVID -19 (Prasetya, 2020). Dalam kondisi seperti ini sangat diperlukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat. Karena pembangunan yang paling dekat dengan daerah setempat adalah desa, maka pada saat itu wilayah memiliki bagian penting yang sedang dikembangkan yang nantinya akan menggantikan daerah setempat. Salah satu kereta perbaikan di wilayah adalah dengan membangun Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUM Desa.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (6) menyatakan bahwa “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Dalam pengertian tersebut yang dimaksud dengan “kelimpahan kota terpencil” adalah laporan aset dan tanggung jawab penyelenggaraan BUM Desa dibuat secara eksplisit dimana keseimbangan dan tanggung jawab BUM Desa dipisahkan dari catatan keuangan dan tanggung jawab pemerintah kota (Purnomo, 2020). BUM Desa berencana untuk menggunakan semua potensi moneter, organisasi keuangan hanya sebagai kemampuan aset normal dan SDM yang dimiliki oleh kota untuk bekerja pada bantuan pemerintah daerah kota. Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro milik desa, kekuatan BUM Desa diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi saat ini. Meski diterpa pandemi, diharapkan kinerja BUM Desa tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak tergoyahkan.

Keberadaan BUM Desa di wilayah kabupaten Buleleng juga cukup berkembang pesat, khususnya di kecamatan Sawan saat ini telah memiliki 13 BUM Desa yang diantaranya:

Tabel 1.1
Jumlah Persebaran BUM Desa di Kecamatan Sawan

No	Desa	Nama BUM Desa	Jenis Usaha
1.	Desa Lemukih	Giri Mekar	simpan pinjam dan waserda.
2.	Desa Galungan	Wana Amertha	simpan pinjam, pertokoan, pengelolaan hutan, air bersih.
3.	Desa Sekumpul	Sekar Bang	simpan pinjam, pariwisata, air bersih.
4.	Desa Bebetin	Banwa Bharu	simpan pinjam, peternakan, air bersih.
5.	Desa Sawan	Swadesi	simpan pinjam, unit air bersih, distribusi pemungutan iuran sampah dan PPOB.

6.	Desa Menyali	Laksadana Menyali	simpan pinjam, ternak, sampah, ruko, toko yadnya, swakelola sampah, UPS.
7.	Desa Jagaraga	Suka Pura	simpan pinjam, air bersih, usaha dagang.
8.	Desa Girimas	Labdajaya	pengelolaan sampah, pengelolaan tempat parkir dan Tenten.
9.	Desa Sangsit	Sidi Amerta	simpan pinjam, Ternak, pembayaran listrik, air bersih.
10.	Desa Bungkulan	Kusuma Asri	simpan pinjam, pengelolaan sampah.
11.	Desa Kerobokan	Sida Molih	pengelolaan sampah, penyewaan dan jual beli produk pertanian.
12.	Desa Sinabun	Sari Guna Amertha	Simpan pinjam, pasar, air bersih.
13.	Desa Sudaji	Muncul Sari Aji	simpan pinjam, air bersih, pasar desa.

(Sumber: Hasil Observasi Langsung)

Perkembangan ekonomi wilayah lingkungan tergantung pada kebutuhan, potensi, batas wilayah, dan kepentingan modal dari otoritas publik. Oleh sebab itu BUM Desa dapat menyesuaikan jenis bidang usaha dengan potensi desa dan juga informasi pasar saat ini sehingga kegiatan oprasional BUM Desa tidak 100% dilumpuhkan. Jenis usaha yang dapat menjadi pilihan BUM Desa yakni pada bidang: bisnis sosial, keuangan, bisnis penyewaan, lembaga perantara, perdagangan, usaha bersama, kontraktor, pariwisata dan sebagainya. Pada dasarnya yayasan dan kepengurusan BUM Desa merupakan tanda penyelenggaraan keuangan kota yang bermanfaat yang diselesaikan secara gotong royong, partisipatif, emansipatoris, lugas, bertanggung jawab, dan terkendali (Arnis, 2018). Dengan demikian diperlukan pengurus BUM Desa yang sah dengan tujuan agar dapat berjalan dengan bebas, sukses dan ahli. Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa masih banyak hal yang harus diperhatikan dalam

penyelenggaraan BUM Desa dengan alasan kesulitan dan hambatan akan terus terlihat oleh BUM Desa.

Khusus untuk Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Sawan yang diketahui pada tabel bahwa hampir semua BUM Desa di kecamatan sawan mengandalkan kegiatan simpan pinjam sebagai usaha pokok dari oprasionalnya. Kegiatan simpan pinjam bergerak untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat desa. Namun, seperti yang kita ketahui saat ini unit keuangan yang bergerak pada bidang simpan pinjam tidak hanya ada satu jenis melainkan sudah ada beberapa jenis badan keuangan yang menyediakan jasa simpan pinjam di pedesaan antara lain: Koperasi, LPD, BPR, Pegadaian dan sebagainya. Dengan melihat banyaknya jenis badan keuangan yang berada di Desa, BUM Desa harus dapat bersaing dan unggul untuk mempertahankan keberadaannya di lingkungan masyarakat.

Dalam rangka mempertahankan keberadaan BUM Desa yang juga disibukkan dengan dana investasi dan uang muka, BUM Desa harus mampu untuk memupuk, menumbuhkan dan mengikat kepercayaan masyarakat desa yang dalam hal ini adalah nasabah dan calon nasabah di BUM Desa. Laporan keuangan adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pernyataan ini didukung dengan pendapat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati “masyarakat akan menggali informasi pada laporan keuangan, kalau neraca dan laporan keuangan baik maka rakyat percaya. Kalau laporan keuangan buruk maka masyarakat akan resah” (dalam acara seminar nasional yang diselenggarakan saat Peringatan Hari Oeang ke-71). Keresahan masyarakat inilah yang menjadi salah satu faktor masyarakat tidak akan

mempercayakan dananya untuk disalurkan jika suatu badan keuangan tidak memiliki alat pertanggungjawaban yang relevan dan handal. Secara tidak langsung, BUM Desa di kecamatan sawan memiliki tanggungjawab lebih untuk menjaga kualitas dari laporan keuangannya agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

Informasi keuangan tertuang pada Laporan keuangan, sehingga sudah menjadi kewajiban pengelola BUM Desa untuk memiliki laporan keuangan di setiap periodenya. Laporan keuangan diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola BUM Desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah khususnya di desa. Selain dipergunakan untuk mengikat kepercayaan masyarakat, masing-masing BUM Desa memang sudah diwajibkan untuk menyediakan laporan keuangan sesuai dengan amanat dari UU No. 4 Tahun 2015 Bab III pasal 12 ayat 3 yang menyatakan bahwa “pelaksana fungsional disetujui untuk membuat laporan keuangan seluruh unit khusus BUM Desa secara konsisten” sebagaimana perintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mewajibkan adanya laporan pertanggungjawaban atas Alokasi Dana Desa dalam program penguatan. Tidak cukup untuk datang, karna BUM Desa adalah usaha yang melibatkan dana desa dan juga dana masyarakat, maka keterbukaan data, kehandalan data, jaminan atas kekayaan desa serta wujud transparansi juga harus ditegaskan untuk memupuk kepercayaan masyarakat desa.

Setyawan (2018) menyampaikan bahwa laporan keuangan BUM Desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola BUM Desa tentang penatausahaan kekayaan moneter yang digunakan direksi BUM Desa selama satu periode. Perlu dipahami bahwa data yang terdapat dalam ikhtisar fiskal akan

diandalkan, digunakan sebagai sumber perspektif dan sangat dipercaya oleh berbagai kalangan. Laporan keuangan yang dibuat harus berkualitas sehingga memiliki nilai dan manfaat positif bagi para pemakai laporan keuangan. Dalam PSAK disebutkan bahwa kriteria kualitas informasi yang menjadikan data dalam laporan keuangan BUM Desa memiliki nilai dan keunggulan yang terdiri dari: (1) penting, (2) padat, (3) serupa, dan (4) wajar. Sifat laporan moneter memiliki banyak keuntungan, baik untuk masyarakat, Pemerintah Desa serta pengelola BUM Desa. Informasi dalam laporan keuangan dapat bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan yang relevan dan handal. Untuk itulah pengelola BUM Desa harus fokus pada data yang diperkenalkan dalam ringkasan anggaran untuk alasan pengaturan, pengendalian, dan dinamis oleh berbagai pertemuan.

Laporan keuangan direksi BUM Desa diperlukan untuk mematuhi Standar Akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah terdekat yang ditentukan untuk membuat laporan keuangan lebih bertanggung jawab dan memperluas data ringkasan anggaran. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Dasar Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa pada PSAK. Namun, dari hasil observasi awal ditemukan fakta bahwa masih terdapat BUM Desa yang masih kesulitan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Koordinator di bidang PEMDES pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyatakan bahwa, masih banyak BUM Desa yang bermasalah dan perlu mendapatkan pengawasan. Pernyataan ini didukung dengan data perkembangan BUM Desa yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Perkembangan BUM Desa Kecamatan Sawan

No.	Desa	Nama BUM Desa	Keterangan
1.	Desa Lemukih	Giri Mekar	Berkembang.
2.	Desa Galungan	Wana Amertha	Bermasalah.
3.	Desa Sekumpul	Sekar Bang	Berkembang.
4.	Desa Bebetin	Banwa Bharu	Bermasalah.
5.	Desa Sawan	Swadesi	Berkembang.
6.	Desa Menyali	Laksadana Menyali	Berkembang.
7.	Desa Jagaraga	Suka Pura	Berkembang.
8.	Desa Girimas	Labdajaya	Baru terbentuk.
9.	Desa Sangsit	Sidi Amerta	Berkembang.
10.	Desa Bungkulan	Kusuma Asri	Bermasalah.
11.	Desa Kerobokan	Sida Molih	Kurang Berkembang.
12.	Desa Sinabun	Sari Guna Amertha	Bermasalah.
13.	Desa Sudaji	Muncul Sari Aji	Bermasalah.

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, 2021)

Dari informasi tersebut, cenderung terlihat bahwa masih banyak BUM Desa di kecamatan sawan yang bermasalah. Kordinator PEMDES menyatakan bahwa masih banyak BUM Desa yang menyajikan data-data yang tidak sesuai dalam laporan keuangan baik itu kesalahan pencatatan atau kurangnya ketelitian dari SDM sehingga mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan pada laporan keuangan BUM Desa. Banyak kasus yang terjadi pada BUM Desa kecamatan sawan, dimana pengelola BUM Desa tidak dapat mempertanggung jawabkan ketidak seimbangan neraca yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan dan kurangnya ketelitian. Salah saji yang sifatnya material ataupun tidak dapat merugikan BUM Desa. Kordinator BUM Desa juga menyatakan masalah lain yang sering terjadi yaitu masih banyak BUM Desa yang terlambat dalam melaporkan

laporan keuangan mulai dari laporan bulanan hingga laporan tahunan. Melihat fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan BUM Desa belum sepenuhnya berkualitas.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor utama yang memiliki peran penting dan bertanggungjawab pada baik atau buruknya kualitas laporan keuangan. BUM Desa mengalami kesulitan dalam perekrutan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan handal. Sebagian besar perekrutan SDM BUM Desa dilakukan dengan cara kesukarelaan tanpa memperhitungkan keahlian, kompetensi dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh SDM. Sehingga masih ditemukan pengelola BUM Desa yang tidak bekerja sesuai bidang profesi, tidak memiliki kompetensi yang memadai serta mereka juga tidak memiliki pengalaman bekerja di unit keuangan. Keterbatasan SDM yang handal menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti kesalahan pencatatan, kurangnya kemampuan dalam mengidentifikasi masalah serta kurangnya evaluasi kinerja .

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah perkumpulan yang memiliki tugas dan pengaruh paling besar terhadap sifat laporan keuangan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan BUM Desa adalah pribadi-pribadi yang memiliki jiwa ahli, memiliki kemampuan dan wawasan kerja yang memadai. Penegasan ini dikuatkan oleh konsekuensi eksplorasi Basar (2017) yang menunjukkan bahwa keterampilan perakitan mekanik inspektorat yang dipoles secara positif mempengaruhi sifat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. Efek samping dari penelitian Wirawan (2016) yang menunjukkan bahwa kemampuan dan pengalaman kerja memiliki dampak positif dan kritis terhadap sifat laporan moneter.

Laporan keuangan BUM Desa yang digunakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepala BUM Desa harus dilakukan secara ahli. Keterampilan yang dapat dibuktikan dapat diartikan sebagai mentalitas dan perilaku individu dalam menyelesaikan panggilannya dengan kesungguhan dan kewajiban serta menjaga citra publik (Gusfiardi, 2019). Individu yang memiliki mentalitas ahli adalah individu yang dapat menempatkan dirinya untuk memahami kewajiban dan tugasnya, koneksi dan koneksi, dan berpusat dan dapat diprediksi dengan kepentingan pekerjaannya. Mentalitas mahir sangat penting untuk dimiliki, karena mereka akan berusaha untuk memberikan hasil terbaik tidak terkecuali dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Kusuma (2012) indikator minimal untuk mengukur profesionalisme adalah memiliki pengabdian pada profesi, taat dengan kewajiban sosial, mandiri dan memiliki keyakinan terhadap profesi. Dengan memiliki indikator tersebut seseorang yang profesional dapat diandalkan untuk melakukan alokasi asset dan keuangan secara efektif dan efisien serta dapat diandalkan untuk mengidentifikasi potensi dan pemilihan jenis usaha dengan tepat. Hasil penelitian Rahayu (2017) menunjukkan bahwa keterampilan administrasi moneter provinsi yang dipoles secara signifikan mempengaruhi sifat laporan. Eksplorasi ini sesuai dengan penelitian yang diarahkan oleh Basar (2017) dan Kusuma (2012) yang menemukan bahwa keterampilan yang dipoles memiliki dampak positif dan kritis terhadap ringkasan fiskal. Meskipun demikian, terlepas dari konsekuensi eksplorasi yang diarahkan oleh Gusfriadi, dkk (2019) yang menemukan bahwa keterampilan yang dipoles tidak berdampak besar pada sifat tinjauan interior. Efek samping dari

penyelidikan masa lalu menunjukkan bahwa ada kontras atau ketidakberesan antara satu pemeriksaan dengan pemeriksaan lainnya.

Setiap administrator moneter harus memiliki pemahaman yang baik tentang ringkasan fiskal sehingga ringkasan fiskal yang didistribusikan kemudian dapat diperkenalkan secara wajar dan dibebaskan dari kesalahan kutipan material agar tidak menyesatkan pembaca dan klien laporan (Murina dan Rahmawaty:2017) . Untuk menunjang kompetensi yang baik mengenai laporan keuangan dan tingkat intelektualitas, seseorang dapat memperolehnya dari pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan formal dapat ditempuh dari pendidikan yang diselenggarakan disekolah ataupun perguruan tinggi sedangkan pendidikan nonformal dapat ditempuh dari kegiatan seminar, pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya. Kompetensi dibidang Pembukuan penting dalam perencanaan ringkasan anggaran. Dengan wawasan atau informasi pembukuan yang bagus dan kokoh, sifat pengungkapan keuangan suatu organisasi akan lebih baik dan terhindar dari penipuan karena tidak adanya informasi tentang pembukuan itu sendiri. (Cahyadi dan Gunadi: 2017) . Tanpa pemahaman dalam laporan keuangan yang baik akan berdampak pada kecenderungan untuk membuat laporan keuangan yang kurang tepat, baik itu bersifat material atau tidak saat penyajian angka, ketidak sesuaian dengan pelaporan, bahkan pelaporannya dapat tidak tepat waktu yang dapat merugikan bagi pengguna laporan itu sendiri.

Dalam penelitian Budiono, dkk (2018) disebutkan bahwa “untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu pendidikan, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan

pengembangan wawasan”. Semakin tinggi derajat intelektualitas dan tingkat pemahaman karyawan maka Sumber Daya Manusia tersebut akan memiliki lebih banyak ketersediaan dan kapasitas dalam teknik regulasi dan membuat laporan pertanggungjawaban sehingga laporan keuangan dapat menjadi luar biasa. Eksplorasi yang disutradarai oleh Pujaniari (2017) menunjukkan hasil “Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Eksplorasi ini didukung oleh hasil penelitian yang diarahkan oleh Ningrum (2018) dan Wirawan (2016) yang menunjukkan bahwa kemampuan mempengaruhi sifat laporan moneter. Berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dipimpin oleh Wijayanti dan Handayani (2017) yang menunjukkan bahwa keterampilan SDM tidak berpengaruh positif terhadap sifat laporan keuangan daerah. Eksplorasi yang disutradarai oleh Wijayanti dan Handayani (2017) ini sesuai dengan konsekuensi pemeriksaan Gusfiardi, dkk (2020). Akibat dari pemeriksaan yang lalu menunjukkan adanya perbedaan atau ketidakberesan antara pemeriksaan yang satu dengan pemeriksaan yang lain.

Dalam pekerjaan perlu adanya sebuah pengalaman yang menjadi persyaratan dengan tujuan bahwa karyawan tersebut tidak akan canggung untuk siap menempatkan diri dalam kondisi yang berbeda, siap menghadapi tantangan, siap menghadapi kesulitan dengan tugas penuh dan siap berdiskusi dengan baik dengan berbagai pertemuan (Romandhon: 2019). Pengalaman menarik keluar kapasitas terpendam seseorang. (Budiono.dkk, 2018) Potensi penuh akan muncul terus setelah beberapa waktu karena pertemuan yang berbeda. Jadi dalam hubungan ini yang harus diperhatikan adalah kemampuan individu untuk memperoleh keuntungan dari perjumpaannya, baik perjumpaan yang manis

maupun yang berat. Jadi pada dasarnya, pengalaman adalah pemahaman tentang sesuatu yang terselubung dan dengan menghadapi dan menghadapi sesuatu, pembelajaran, informasi, kemampuan atau kualitas dimasukkan ke dalam potensi diri.

Perwakilan yang memiliki pengalaman lebih siap untuk menambahkan informasi khusus atau kemampuan kerja, untuk lebih spesifik dengan berfokus pada orang lain, mengikuti dan mengurus usaha atau pekerjaan mereka sendiri. Dengan menjaga pekerjaan yang terus-menerus dilakukan, seseorang akan memperoleh informasi baru sehingga mereka lebih mampu dalam menyelesaikan kewajibannya dan juga akan terbuka kesempatan untuk mendapatkan cara kerja yang lebih efektif, membunmi, dan bermanfaat. Dengan memiliki wawasan kerja, seorang perwakilan juga akan lebih mampu dan tanggap dalam mengumpulkan laporan keuangan. Mereka yang sudah berpengalaman dalam mengatasi sebuah organisasi akan lebih cermat untuk memanfaatkan kejadian masa lalu sebagai pelajaran di masa depan, untuk mendapatkan pelajaran tersebut mereka akan melakukan berbagai evaluasi yang dibutuhkan . Salah satu acuan untuk melakukan evaluasi adalah dari laporan keuangan, mereka akan memanfaatkan informasi dari laporan keuangan tersebut sehingga secara tidak langsung sudah menjadi kebutuhan mereka untuk menyiapkan llaporan keuangan yang berkualitas. Konsekuensi pemeriksaan oleh Sukriani (2019) menemukan bahwa pengalaman kerja secara positif mempengaruhi sifat laporan keuangan. Pemeriksaan ini diperkuat dengan hasil eksplorasi yang disutradarai oleh Gusfiardi dkk (2019), Wirawan (2016), dan Kusuma (2012). Berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dipimpin oleh Budiono, dkk (2018), penelitian ini menunjukkan bahwa

pengalaman kerja tidak secara signifikan mempengaruhi sifat laporan keuangan daerah. Efek samping dari penyelidikan masa lalu menunjukkan bahwa ada kontras atau ketidakberesan antara satu pemeriksaan dan pemeriksaan lainnya.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, khususnya pemanfaatan variabel Independen (X). Dalam pemeriksaan ini dipilih faktor Sumber Daya Manusia, khususnya; metodologi, kemampuan, dan pengalaman kerja yang dipoles yang memengaruhi sifat laporan moneter. Perbedaan lain terletak pada objek penelitian, eksplorasi ini dipimpin pada Badan Usaha Milik Desa yang terletak di Kecamatan Sawan. Alasan penyelidikan ini adalah untuk memutuskan apakah keterampilan, kemampuan, dan pengalaman kerja yang ditunjukkan memengaruhi sifat laporan moneter sehingga dapat menambah penemuan baru yang dapat diandalkan untuk membangun konsistensi penelitian sebelumnya yang memeriksa sifat ringkasan fiskal.

Berdasarkan gambaran yayasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengarahkan penelitian yang berjudul, “Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Sawan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dilihat dari landasan yang telah dibicarakan, maka hal-hal yang dapat dibedakan adalah sebagai berikut:

1. Masih ditemukan karyawan BUMDesa yang tidak bekerja sesuai profesi atau bidang keahliannya serta kurangnya tanggungjawab yang dimiliki pengelola

BUM Desa sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan yang menyebabkan neraca tidak *balance*.

2. Perekrutan pengelola BUM Desa yang tidak menggunakan syarat untuk memiliki kompetensi yang memadai khususnya dibidang akuntansi menyebabkan pengelola BUM Desa kurang berkompeten dalam menyediakan laporan yang berkualitas
3. Kurangnya pengalaman kerja yang dimiliki oleh karyawan BUM Desa sehingga BUM Desa memiliki keterbatasan dalam tata administrasi yang baik serta penyajian laporan keuangan juga belum dilaksanakan secara efektif dan efisien yang menyebabkan laporan keuangan terlambat untuk dilaporkan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah harus dilakukan sedemikian rupa sehingga eksplorasi dapat membidik tambahan pada topik dan target yang ingin dicapai serta menghindari terlalu luasnya pembahasan yang dapat menyebabkan kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan. Maka dari itu faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian untuk membatasi permasalahan yang dibahas adalah profesionalisme, kompetensi dan pengalaman kerja. Responden dalam pemeriksaan ini adalah Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan bukti-bukti yang dapat diketahui dari masalah dan hambatan dari masalah yang telah diperiksa, masalah dalam pemeriksaan ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Apakah keterampilan yang dapat dibuktikan mempengaruhi sifat laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sawan?
2. Apakah keterampilan mempengaruhi sifat ikhtisar fiskal Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sawan?
3. Apakah pengaruh pengalaman kerja terhadap sifat laporan anggaran Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Sawan?

1.5 Tujuan Penelitian

Mencermati perincian permasalahan yang telah dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dari eksplorasi ini adalah:

1. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memutuskan dampak metodologi yang dipoles terhadap sifat laporan anggaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sawan.
2. Memutuskan dampak kemampuan terhadap sifat ikhtisar fiskal Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Sawan.
3. Untuk memutuskan dampak wawasan kerja terhadap sifat rangkuman anggaran Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Sawan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil yang didapat diperlukan untuk menambah konsekuensi bukti pengamatan sehubungan dengan dampak metodologi yang dipoles, kemampuan dan wawasan kerja terhadap sifat laporan keuangan BUMDes di sub-wilayah Sawan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti Selanjutnya

Melalui eksplorasi ini dipercaya dapat menambah pengetahuan tentang pedoman kualitas laporan keuangan dan komponen apa saja yang dapat mempengaruhi sifat laporan keuangan khususnya di BUM Desa dan dapat menganalisis kesesuaian hipotesis yang didapat di sekolah dengan praktek nyata di lapangan. pekerjaan.

b. Untuk Badan Usaha Milik Desa

Melalui peninjauan ini dipercaya tidak lain adalah bahan pemikiran dan pemikiran para pelaku usaha, khususnya BUM Desa untuk menggarap sifat laporan keuangan yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada daerah.

c. Untuk Masyarakat

Melalui peninjauan ini dipercaya akan memperluas kepastian masyarakat untuk menempatkan asetnya di BUM Desa guna membantu pembangunan dan kelancaran pembangunan moneter di daerah pedesaan.